

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber peningkatan taraf hidup penduduk dan proses utama yang dapat membawa perekonomian menuju tahap yang lebih maju (Boediono, 2017). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Peranan sektor-sektor ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dirasa semakin penting. Melalui proses pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode tertentu (Masloman, 2018).

Menurut Wardani et al (2024), pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dari keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, tentunya akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi guna memahami dinamika perubahan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan ini mencerminkan seberapa cepat perekonomian berkembang dan menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Laju pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Sumatera mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Menurut Muzakki et al (2025), ada banyak prospek ekonomi di Pulau Sumatra, salah satu pulau terbesar di Indonesia. Faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sumber daya alamnya, yang meliputi mineral, perkebunan, dan hasil hutan. Meskipun demikian, berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi Sumatera yang kompleks.

Dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dan kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan

ekonomi di Pulau Sumatera serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Mengenai pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Pembagian dana yang adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan permasalahan yang dibahas dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini mulai berlaku pada tahun 2004. Salah satu bentuk desentralisasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan perekonomian dari tahun ke tahun adalah desentralisasi dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan otonomi daerah.

Mengukur kemajuan perekonomian memerlukan instrumen pengukuran yang tepat, berupa ukuran pertumbuhan ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode satu tahun tertentu, yang diukur berdasarkan harga, sesuai dengan pernyataan Putri (2015). Angka PDRB dapat berbeda jika dibandingkan antar wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan persentase perubahan PDRB, bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya, menurut data yang disajikan.

**Tabel 1.1** Laju PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi di Sumatera

Provinsi	Laju PDRB (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	5.32	1.32	11.18	13.75	7.93
SUMATERA UTARA	8.09	1.18	6.01	11.08	10.03
SUMATERA BARAT	6.87	-1.84	4.63	12.75	9.60
RIAU	1.29	-4.91	15.31	18.19	3.52
JAMBI	4.48	-5.80	13.27	19.12	6.15
SUMATERA SELATAN	8.46	-0.14	8.59	19.53	6.62
BENGKULU	8.63	1.61	8.59	13.20	7.15
LAMPUNG	8.09	-2.12	5.15	11.57	8.39
KEP. BANGKA BELITUNG	3.70	-0.41	13.83	10.86	7.70
KEP. RIAU	7.63	-5.22	8.47	12.05	7.46

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2024), Data Diolah*

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan indikator penting bagi kesejahteraan sosial suatu daerah. Di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang beragam di berbagai provinsi. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan dampak pandemi COVID-19, upaya pemulihan, dan dinamika ekonomi regional. Pada tahun 2019, sebelum pandemi, seluruh provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, investasi yang meningkat, belanja pemerintah yang stabil, dan ekspor yang masih tinggi. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Bengkulu (8,63%), diikuti Sumatera Selatan (8,46%) dan Sumatera Utara (8,09%). Namun, pandemi tahun 2020 memukul keras seluruh provinsi, dengan sebagian besar mengalami kontraksi tajam. Provinsi seperti Jambi (-5,80%), Riau (-4,91%), dan Kepulauan Riau (-5,22%) mengalami penurunan terburuk. Hanya beberapa provinsi, seperti Bengkulu (1,61%) dan Aceh (1,32%), yang berhasil mempertahankan pertumbuhan positif, meskipun melambat.

Tahun 2021 menjadi awal pemulihan ekonomi, dengan semua provinsi kembali mencatat pertumbuhan positif. Riau (15,31%) dan Kepulauan Bangka Belitung (13,83%) menjadi yang tertinggi, didukung oleh sektor industri dan ekspor. Pemulihan terus berlanjut pada 2022, di mana pertumbuhan yang sangat kuat terjadi di Jambi (19,12%) dan Sumatera Selatan (19,53%), menunjukkan pemulihan ekonomi yang pesat. Pada 2023, terjadi stabilisasi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi. Meskipun pertumbuhan melambat dibandingkan 2022, banyak provinsi berhasil mencapai atau melampaui tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. Sumatera Utara (10,03%) dan Sumatera Barat (9,60%) menjadi contoh provinsi dengan pertumbuhan yang solid, sementara Riau (3,52%) mengalami penurunan tajam dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak efektif. APBN adalah usulan anggaran tahunan pemerintah Indonesia yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, bertujuan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Namun, ketidakjelasan penerimaan dana dari pemerintah pusat dan efisiensi APBN yang rendah turut menyumbang pada ketidakpastian ekonomi. Setelah dialokasikan, dana tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian lokal, ketahanan suatu daerah berbeda-beda.

Pemulihan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) berbasis pajak, dan DBH bukan pajak. Menurut Devi & Tjahjono (2023), PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain itu, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Menurut Undang- Undang nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi hasil (DBH) merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kepada angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH ini melihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Jika daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah maka akan mendapatkan porsi yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. DBH diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dengan memperhatikan potensi daerah produksi. DBH pajak dan DBH bukan pajak merupakan transfer dari pemerintah pusat yang penting untuk mendukung belanja modal daerah.

Belanja modal yang merupakan bagian dari belanja daerah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian dalam pengalokasiannya anggaran belanja modal digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pengadaan aset tetap di suatu daerah (Fuady & Weriantoni, 2023). Menelaah interaksi antara PAD, DBH pajak, DBH bukan pajak, dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perekonomian di tingkat daerah.

**Tabel 1.2** Jumlah PAD Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	2.570,78	2.505,89	2.917,15	2.987,19
SUMATERA UTARA	5.531,24	6.402,71	7.258,02	7.225,69
SUMATERA BARAT	2.255,07	2.551,90	2.851,97	2.471,22
RIAU	3.333,18	4.050,47	4.696,77	5.866,45
JAMBI	1.535,18	1.843,43	2.163,59	1.900,66
SUMATERA SELATAN	3.375,10	3.865,46	4.930,95	5.199,84
BENGKULU	712,35	984,42	1.088,42	1.033,85
LAMPUNG	2.842,29	3.249,67	3.678,30	3.766,19
KEP. BANGKA BELITUNG	683,43	895,76	1.090,48	949,85
KEP. RIAU	1.195,64	1.375,77	1.675,73	1.806,97

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Tabel 1.2 menunjukkan data realisasi PAD dari beberapa provinsi di Sumatera selama 2020-2023 menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan kondisi ekonomi lokal dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya. Provinsi Aceh mencatat peningkatan PAD dari 2.570,78 miliar rupiah pada 2020 menjadi 2.987,19 miliar rupiah pada 2023, dengan sedikit penurunan pada 2021. Sumatera Utara menunjukkan peningkatan konsisten dari 5.531,24 miliar rupiah pada 2020 menjadi 7.225,69 miliar rupiah pada 2023. Sumatera Barat mengalami kenaikan hingga 2022 namun turun pada 2023. Riau mencatat pertumbuhan signifikan dari 3.333,18 miliar rupiah pada 2020 menjadi 5.866,45 miliar rupiah pada 2023. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, optimalisasi pemungutan pajak, serta investasi infrastruktur dan sektor unggulan. Digitalisasi sistem pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dukungan pemerintah pusat juga berperan dalam mendorong kenaikan PAD.

Jambi menunjukkan peningkatan pada 2021 dan 2022, tetapi turun pada 2023. Sumatera Selatan terus meningkat dari 3.375,10 miliar rupiah pada 2020 menjadi 5.199,84 miliar rupiah pada 2023. Provinsi Bengkulu dan Kepulauan

Bangka Belitung mencatat peningkatan moderat dengan beberapa fluktuasi. Lampung mengalami peningkatan stabil dari 2.842,29 miliar rupiah pada 2020 menjadi 3.766,19 miliar rupiah pada 2023, sementara Kepulauan Riau konsisten meningkat dari 1.195,64 miliar rupiah pada 2020 menjadi 1.806,97 miliar rupiah pada 2023.

Secara keseluruhan, banyak provinsi di Sumatera mengalami peningkatan PAD, menunjukkan keberhasilan optimalisasi sumber daya daerah. Namun, terdapat disparitas dalam tingkat pertumbuhan PAD antar provinsi. Sejumlah variabel mempengaruhi perubahan PAD, termasuk perekonomian nasional dan regional, kebijakan fiskal, serta sumber daya dan potensi masing-masing provinsi.

**Tabel 1.3** Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	571,38	231,73	427,86	461,6
SUMATERA UTARA	473,8	803,63	809,15	581,37
SUMATERA BARAT	146,66	187,72	200,04	180,03
RIAU	1.841,21	1.942,42	1.879,97	1.615,51
JAMBI	445,13	488,34	671,46	507,96
SUMATERA SELATAN	1.955,90	1.936,83	2.652,59	2.480,24
BENGKULU	72,99	90,74	124,47	134,17
LAMPUNG	161,69	228,98	276,42	209,98
KEP. BANGKA BELITUNG	129,01	244,59	529,42	325,13
KEP. RIAU	460,88	466,88	733,27	693,27

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan DBH pajak dan bukan pajak, seperti terlihat padadata realisasi DBH dari beberapa provinsi di Sumatera selama 2020-2023. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan yang memiliki tingkat realisasi DBH relatif tinggi berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi apabila dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kontribusi besar dari sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perkebunan (kelapa sawit dan karet), pertambangan, serta minyak dan gas bumi. Kenaikan realisasi DBH terjadi akibat peningkatan harga komoditas

global, meningkatnya produksi dan ekspor, serta efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi dari sektor-sektor tersebut. Jika dikelola dengan baik, dana ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor produktif lainnya. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung yang mengalami penurunan realisasi DBH akan menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan belanja modal.

Berdasarkan data, realisasi DBH Provinsi Riau mencapai Rp.1.841,21 miliar pada tahun 2020 dan masih berada pada level yang tinggi hingga tahun 2023, sedangkan jumlah realisasi DBH Sumsel mencapai Rp.1.955,9 miliar pada tahun 2020 dan Rp.2 triliun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan angka yang tinggi sebesar 480,24 miliar rupiah. Realisasi DBH yang menurun dari Rp.146,66 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.180,03 miliar pada tahun 2023 menunjukkan adanya potensi tantangan perekonomian negara. Secara umum, daerah dengan tingkat realisasi DBH yang lebih tinggi memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan realisasi pajak dan DBH bukan pajak memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan belanja modal. Belanja modal yang tepat berkontribusi pada perbaikan infrastruktur dan penguatan basis perekonomian daerah.

**Tabel 1.4** Jumlah Belanja Modal Provinsi di Sumatera

Provinsi	Realisasi Belanja Modal (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
ACEH	1.755,47	2.199,33	2.868,71	1.676,03
SUMATERA UTARA	1.497,94	1.141,20	1.776,12	2.629,55
SUMATERA BARAT	736,89	666,35	941,07	952,72
RIAU	919,25	1.018,46	1.508,53	2.082,95
JAMBI	642,7	449,69	906,8	1.031,00
SUMATERA SELATAN	1.664,70	1.836,83	1.536,37	1.239,94
BENGKULU	417,1	324,34	417,02	586,89
LAMPUNG	752,53	849,69	1.025,33	1.207,38
KEP. BANGKA BELITUNG	436,5	428,65	354,01	566,22
KEP. RIAU	586,61	338,33	552,16	618,88

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024*

Berdasarkan data belanja modal Sumatera, realisasi belanja modal Sumatera bervariasi pada tahun 2020 hingga 2023. Beberapa provinsi seperti Riau dan Jambi, mengalami peningkatan belanja modal dari tahun ke tahun. Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.919,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.2.829,5 miliar pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.642,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.1.031,00 miliar pada tahun 2023. Peningkatan belanja modal yang dimaksud terutama mencakup investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, belanja modal juga dapat mencakup pengadaan peralatan dan sarana pendukung layanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun fluktuasi atau penurunan juga terjadi di provinsi lain, seperti Aceh dan Sumatera Selatan. Misalnya di Aceh, jumlahnya meningkat dari Rp.1.755,47 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.2.868,71 miliar pada tahun 2022, namun kemudian menurun tajam menjadi Rp.1.676,03 miliar. Di Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal juga mengalami penurunan pada tahun 2020 dari Rp. 1.664,7 miliar dan pada tahun 2023 menjadi 1.239,94 miliar rupiah.

Ada perbedaan besar dalam belanja modal antar Provinsi. Misalnya saja Aceh dan Sumatera Selatan yang memiliki belanja modal tertinggi pada tahun 2020, masing-masing sebesar Rp.1.755,47 miliar dan Rp.1.664,7 miliar. Sedangkan penanaman modal terendah terdapat di Pulau Bengkulu dan Kepulauan Bangkabelitung, masing-masing sebesar Rp.417,1 miliar dan Rp.436,5 miliar. Belanja modal dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan belanja modal yang tepat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan infrastruktur dan memperkuat basis perekonomian daerah.

Salah satu elemen penting dalam perancangan dan implementasi kebijakan pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal mencakup investasi pemerintah pada infrastruktur dan proyek pembangunan jangka panjang. Melalui belanja modal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, produktivitas, dan

daya saing daerah, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera melalui belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah ‘‘Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening’’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera?
- 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai variabel *Intervening* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal Provinsi di Sumatera.
- 2) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui Belanja Modal sebagai variabel *Intervening* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bahwa hasilnya akan memberikan pemahaman teoritis dan praktis yang berharga.

## 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai hal ini di kalangan akademisi dan organisasi dengan mengkaji pengaruh pendapatan daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana belanja modal berfungsi sebagai mediator antara kedua faktor tersebut. Dari hasil penelitian ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Dapat menjadi referensi bagi bidang keilmuan terkait merupakan salah satu manfaatnya.

## 2. Manfaat Praktis

Mengkaji dampak pendapatan daerah, dana bagi hasil perpajakan, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menjadi tujuan utama penelitian ini. Variabel intervening yang dapat mencapai hal tersebut adalah belanja modal. Penekanan utama di sini adalah pemeriksaan terhadap keterkaitan antara tiga dana bagi hasil yang berbeda. Selain itu, buku ini berfungsi sebagai sumber daya bagi pembaca yang mempunyai minat terhadap subjek ini dan ingin mendalaminya lebih dalam. Sebab, hal tersebut berfungsi sebagai acuan.